

Kompas 24/6/03

KONTROVERSI PENERIMAAN MAHASISWA

Sofian Effendi¹

Hampir selama seminggu berita tentang penerimaan mahasiswa baru telah mendominasi wacana di media masa, baik cetak maupun elektronik. Bahkan, koran nasional seperti Kompas dan Media Indonesia, boleh dikata setiap hari telah menjadikan penerimaan mahasiswa, melalui jalur penelusuran bakat dan prestasi yang dilakukan oleh beberapa PTN, sebagai berita utama dan bahkan topik editorial mereka (Kompas tgl 16/6, 18/6, 19/6 dan Media Indonesia tgl 29/5). Ini menunjukkan betapa besar kepedulian nasional kita pada bidang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi.

Namun, kalau kita simak dengan teliti berita-berita di berbagai media, terasa ada sesuatu yang tidak pas dalam cara dan sudut pandang masyarakat dan rekan-rakan insan pers dalam memandang masalah pendidikan tinggi. Argumentasi dan komentar masyarakat dan pengamat hampir semuanya dihindangi oleh rascuriga atau paling tidak keprihatinan mendalam. Publik Indonesia pada umumnya menaruh kekhawatiran yang besar kalau “jalur khusus” penerimaan mahasiswa yang ditempuh oleh beberapa PTN hanyalah sekedar kiat pimpinan untuk menjaring dana sebanyak-banyaknya dari calon mahasiswa. Dengan asumsi seperti itu lah beberapa pengamat langung menyimpulkan bahwa PTN telah melakukan komersialisasi pendidikan tinggi. Judul berita utama di Kompas tanggal 16/6 “Jalur Khusus Mahasiswa Benih Diskriminasi”, mungkin menyiratkan pandangan dan keprihatinan yang sama.

Teman saya Prof. Dr. Anwar Arifin, yang sekarang memegang jabatan Koordinator Bidang Pendidikan Komisi VI DPR, akhirnya ikut berkomentar dan memberikan rektor PTN dan Pemerintah, khususnya Depdiknas. Pak Anwar Arifin khawatir kalau jalur khusus ini terlalu berlebih-lebihan pelaksanaannya, maka proses pemebelajaran akan mengalami penurunan mutu karena rasio dosen mahasiswa menjadi buruk. Karena itulah beliau mengambil inisiatif untuk mengundang para rektor awal bulan depan untuk menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR untuk mendapatkan penjelasan langsung dari pimpinan PT tentang jalur penerimaan mahasiswa yang kontrovesial tersebut.

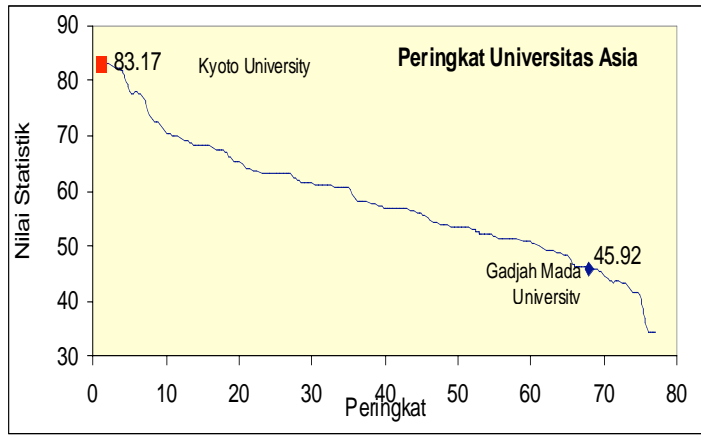
Menurut dugaan saya para rector akan senang sekali dan amat berterima kasih mendapat undangan DPR tersebut. Sekarang mereka dapat menyampaikan langsung kepada para legislator betapa buruk kondisi dan betapa lemahnya kesiapan perguruan tinggi nasional dalam menghadapi serangan globalisasi pendidikan yang sekarang sudah mulai melanda Indonesia.

Perguruan tinggi kita mengalami dua masalah paling mendasar. Pertama, krisis mutu. Kedua, krisis pembiayaan.

¹ Penulis adalah Gurubesar Kebijakan Publik dan Rektor Universitas Gadjah Mada.

Krisis Mutu

Dalam berbagai kesempatan Mendiknas dan para ahli telah sering menyampaikan bahwa dunia pendidikan, tak terkecuali pendidikan tinggi, sedang mengalami krisis mutu. Walaupun kita tidak senang mengakui kenyataan ini, dunia pendidikan tinggi kita memang sedang menghadapi krisis mutu yang cukup parah.



Seperti nampak pada Grafik 1 dan 2, pada survei kualitas akademik perguruan tinggi Asia yang diadakan oleh majalah *Asiaweek* secara berkala sampai tahun 2000, perguruan tinggi nasional kita sejak 1996 telah menunjukkan penurunan mutu secara drastis. Pada pertengahan dekade 1990an, misalnya, UI dan UGM masih berada pada peringkat 38 dan 40.

Tetapi pada tahun 1999, UGM sudah merosot posisinya menjadi 67 dan pada 2000 merosot lagi 1 tingkat, menjadi 68. UI sedikit lebih baik posisinya dari UGM, tetapi perguruan tinggi lainnya seperti UNAIR dan UNDIP hanya mampu mencapai peringkat 10 dari bawah.

Mutu perguruan tinggi nasional kita rendah karena berbagai sarana dan prasarana pendukung mutu akademik yang berstandar internasional tidak mampu kita sediakan, antara lain, jumlah dosen bergelar Doktor harus mencapai 80 persen, gaji dosen dan pegawai yang memadai, jumlah sitasi dalam jurnal ilmiah internasional per dosen, anggaran dan fasilitas penelitian yang *state of the art*, besarnya bandwidth akses ke Internet Global. Perguruan tinggi Indonesia hampir dalam semuanya belum mencapai kualitas yang dapat dibanggakan.

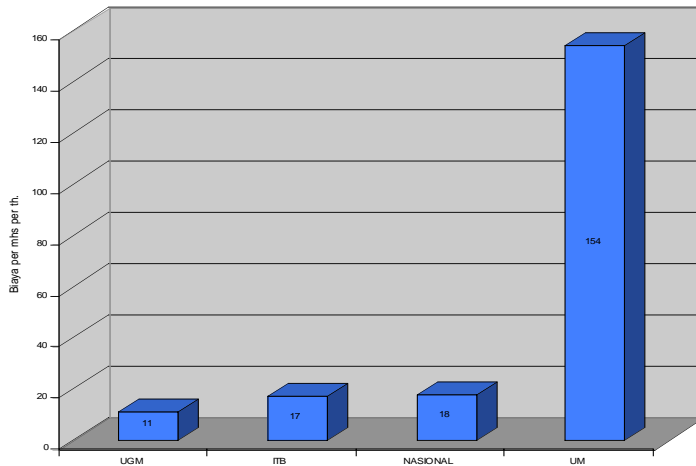
Salah satu kriteria perguruan tinggi bermutu yang digunakan oleh *Asiaweek*, misalnya, adalah gaji staf kependidikan, dan staf pendukung. Saat ini gaji dosen Indonesia hanya 1/20 gaji pensyarah negara jiran, dan bahkan sudah lebih rendah dari gaji di Vietnam. Mutu akademik perguruan tinggi kita merosot tajam karena imbalan yang diberikan tidak memadai.

Anggaran pendidikan terlalu rendah

Prof. Satrio S. Brodjonegoro, Dirjen Dikti, mungkin telah lelah menjelaskan kepada semua pihak, termasuk ke Komisi VI DPR, bahwa anggaran pendidikan dan pendidikan tinggi kita amat rendah. Mungkin salah satu yang terendah di antara negara anggota UNESCO. Anggaran pemerintah untuk bidang pendidikan belum mencapai 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau baru sekitar 7 persen dari APBN. Di negara-negara

maju yang amat menyadari poentingnya pendidikan bagi warganegara rata-rata menyediakan anggaran antara 4,5 sampai 8 persen dari PDB mereka atau lebih dari 20 persen APBN masing-masing.

PERBANDINGAN BIAYA PENDIDIKAN



Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menunjukkan tingkat pembiayaan pendidikan tinggi adalah Biaya Pendidikan (*Cost of Education*), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau pemerintah untuk mendidik seorang mahasiswa per tahun. Sumbangan pendidikan atau uang kuliah yang dibayar oleh setiap mahasiswa hanyalah sebagian dari BP ini. Di UGM, misalnya, pada 2003, jumlah BP rata-rata adalah Rp. 11 juta per mahasiswa per tahun. Uang kuliah, berupa SPP dan BOP, hanya Rp. 1 juta per mahasiswa. Karena itu 91 persen BP merupakan subsidi dari Pemerintah dan subsidi silang dari PT. Subsidi sebesar 91 persen ini diberikan kepada semua mahasiswa. Kebijakan subsidi gaya serampangan ini ternyata tidak mampu menciptakan pemerataan akses ke PT karena hanya 6 persen anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berhasil masuk ke UGM, sedangkan dari keluarga mampu sekitar 76 persen.

BP memang bervariasi antara perguruan tinggi. Di ITB, misalnya, biaya pendidikan tiap mahasiswa diperkirakan Rp. 17 juta per mahasiswa. Di UI, sekitar Rp. 15-16 juta. Di universitas nasional di negara jiran, biaya pendidikan untuk setiap mahasiswa adalah Rp. 154 juta, atau lebih kurang 14 kali BP di UGM, padahal biaya hidup lebih mahal di Jakarta daripada di Kuala Lumpur. Dengan BP sedemikian, perguruan tinggi di Malaysia mampu menyediakan insentif yang cukup mendorong prestasi para dosen. Tetapi dengan biaya segitu ternyata belum mampu menempatkan PT Malaysia pada posisi “*the top ten best universities in Asia*”. Kalau kita melongok jauh ke utara, agar mampu mencapai posisi puncak, posisi 1 seperti yang dicapai oleh Universitas Kyoto, yang telah menghasilkan 3 pemenang Nobel dalam ilmu-ilmu dasar, diperlukan BP sebesar Y 6 juta atau Rp. 600 juta per mahasiswa per tahun. Mungkin seratus tahun lagi baru kita mampu mencapai kondisi dan prestasi seperti itu.

Alternatif Pembiayaan

Menghadapi globalisasi pendidikan yang sudah mulai merambah ke Indonesia, dunia perguruan tinggi harus melakukan dua tugas pokok. Pertama, meningkatkan kualitas

sehingga para lulusannya memiliki keunggulan yang paling tidak sama dengan lulusan PT luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Kedua, menjaga agar pemerataan akses tetap terjaga. Untuk mencapai kedua tujuan ini diperlukan biaya yang besar. Untuk mencapai standar mutu Malaysia diperlukan anggaran sekitar Rp. 60 trilyun. Untuk mencapai standar mutu Jepang, diperlukan anggaran pendidikan tinggi sebesar Rp. 120 trilyun. Padahal di APBN anggaran untuk bidang pendidikan hanya Rp. 11 trilyun. Anggaran pendidikan tinggi hanya sekitar Rp. 4 trilyun. Dengan kontribusi sector swasta, antara lain melalui pembiayaan sendiri seperti yang dijalankan oleh PTS, pengeluaran nasional untuk sector pendidikan tidak lebih dari Rp. 6 trilyun.

Untuk mencapai sasaran-sasaran Probenas di bidang pendidikan tinggi –Peningkatan mutu, peningkatan partisipasi dan pemerataan, kiranya ada dua alternatif pembiayaan yang dapat ditempuh bangsa ini di tahun-tahun mendatang. Pertama, pemerintah menyediakan seluruh anggaran untuk mencapai 3 tujuan pokok pendidikan tinggi nasional. Untuk pendidikan tinggi saja harus disediakan sedikitnya Rp. 60 trilyun. Kedua mengembangkan skema pembiayaan baru, melalui kombinasi peningkatan SPP sampai maksimal 20 persen dari biaya pendidikan dan pola “*deferred payments*” seperti yang diusulkan oleh Profesor Nicholar Barr dari Inggris. Ternyata, Inggris juga sedang menghadapi masalah nasional yang sama dengan kita yakni, penurunan mutu PT dan sistem penggajian yang tidak kompetitif, tetapi pada level kesejahteraan yang berbeda tentunya.

Yogyakarta, 20 Juni 2003